



# KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 1.1 TAHUN 2026

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dilakukannya validasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Terhadap Hasil Evaluasi Jabatan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/825/M.SM.02.00/2025 Tanggal 17 Juni 2025 Perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelas Jabatan, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi Negara.
7. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
8. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
9. Nilai jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
10. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung dibawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
11. Jabatan Non manajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.

### Pasal 2

Kelas Jabatan digunakan sebagai dasar penyusunan atau penyempurnaan Peta Jabatan, penyusunan/penyempurnaan struktur organisasi, pengangkatan pegawai dalam Jabatan, analisis Jabatan, analisis beban kerja, penyusunan formasi, perumusan pengembangan pegawai, mutasi dan redistribusi pegawai serta pemberian tunjangan kinerja.

## BAB II JABATAN ASN

### Pasal 3

- (1) Jabatan ASN terdiri atas:
  - a. jabatan Manajerial; dan
  - b. jabatan Non Manajerial.
- (2) Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jabatan pimpinan tinggi utama;
  - b. jabatan pimpinan tinggi madya;
  - c. jabatan pimpinan tinggi pratama;
  - d. jabatan administrator; dan
  - e. jabatan pengawas.
- (3) Jabatan Non manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jabatan fungsional; dan
  - b. jabatan pelaksana.

### BAB III EVALUASI JABATAN DAN KELAS JABATAN

#### Pasal 4

- (1) Kelas jabatan di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan berdasarkan proses evaluasi jabatan.
- (2) Proses evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode Sistem Evaluasi Faktor atau *Factor Evaluation System* (FES).
- (3) Hasil evaluasi jabatan adalah Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai Kelas Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan mengenai Kelas Jabatan Non manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jabatan Manajerial dan Jabatan Non manajerial dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan apabila:
  - a. adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan;
  - b. adanya penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; dan
  - c. hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan.
- (4) Perubahan dan/atau penambahan kelas jabatan yang dimaksud pada ayat 3, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari menteri pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi.
- (5) Perubahan dan/atau penambahan kelas jabatan yang dimaksud pada ayat 3, dilaksanakan setelah diterbitkannya penetapan dari menteri pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 6

- (1) Penyesuaian nomenklatur jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu tertentu sejak Peraturan Bupati ini diundangkan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur

masing-masing jabatan fungsional.

- (2) Apabila terdapat jabatan yang belum terakomodasi dalam Peraturan Bupati ini, namun telah diusulkan dan memperoleh persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka surat persetujuan Menteri dimaksud dapat dijadikan dasar dalam penetapan kelas jabatan dan nilai jabatan bagi pemangku jabatan sebagai dasar pemberian tunjangan.
- (3) Apabila usulan kelas jabatan dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memperoleh persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka pemangku jabatan yang bersangkutan tetap ditetapkan pada kelas jabatan dan nilai jabatan sebelumnya sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2 Januari 2026  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

SUPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026  
NOMOR 358.1

LAMPIRAN I:  
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR 1.1 TAHUN 2026 TENTANG  
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
 LAMPUNG SELATAN

A. DAFTAR KELAS JABATAN MANAJERIAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
I	SEKRETARIAT DAERAH	
1	Sekretaris Daerah	15
2	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	14
4	Asisten Administrasi Umum	14
5	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	13
6	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan	13
7	Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan	13
8	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	12
9	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	12
10	Kepala Bagian Hukum	12
11	Kepala Bagian Kerjasama	12
12	Kepala Bagian Perekonomian	12
13	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	12
14	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12
15	Kepala Bagian Sumber Daya Alam	12
16	Kepala Bagian Umum	12
17	Kepala Bagian Organisasi	12
18	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12
19	Kepala Sub Bagian Protokol	9
20	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	12

II	SEKRETARIAT DPRD	
1	Sekretaris DPRD	14
2	Kepala Bagian Umum	12
3	Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	9
4	Kepala Bagian Program dan Keuangan	12
5	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	12
6	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	12
III	Inspektur	14
1	Sekretaris	12
2	Sub Bagian Umum dan Keuangan	9
3	Inspektur Pembantu Wilayah I	12
4	Inspektur Pembantu Wilayah II	12
5	Inspektur Pembantu Wilayah III	12
6	Inspektur Pembantu Wilayah IV	12
7	Inspektur Pembantu Wilayah V	12
IV	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	Kepala Satuan	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	9
5	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	9
6	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	11
7	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	9
8	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	9
9	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	11
10	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	9

11	Kepala Seksi Kerjasama	9
12	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	11
13	Kepala Seksi Satuan Linmas	9
14	Seksi Bina Potensi Masyarakat	9
15	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur	11
16	Kepala Seksi Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan Profesi	9
17	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	9
V	DINAS PENDIDIKAN	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
4	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	11
5	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	9
6	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat	9
7	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	11
8	Kepala Seksi Pendidikan dan Kurikulum SD	9
9	Kepala Seksi Pendidikan dan Kurikulum SMP	9
10	Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	9
11	Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas	9
12	Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Dasar (SD/SMP)	9
13	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	11
14	Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP	9
15	Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD	9
16	Kepala UPTD Sekolah Dasar	11
17	Kepala UPTD Sekolah Menengah Pertama	9
18	Kepala UPTD Pendidikan Usia Dini	9

VI	DINAS KESEHATAN	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretariat	12
3	Kepala Sub Bagian keuangan dan Aset	9
4	Kepala Sub Bagian Humas, Kepegawaian dan Umum	9
5	Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat	11
6	Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan	11
7	Kepala Bidang Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	11
8	Kepala Bidang Bina Sumber Daya Kesehatan	11
9	Kepala UPTD	11
10	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD	9
VII	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretariat	12
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
4	Kepala Sub Bagian Peralatan dan Pengelolaan Aset	9
5	Kepala Bidang Bina Marga	11
6	Kepala Bidang Cipta Karya	11
7	Kepala Bidang Sumber Daya Air	11
8	Kepala Bidang Tata Ruang	11
9	Kepala Bidang Bina Program dan Jasa Konstruksi	11
10	Kepala UPTD Pengujian Konstruksi Dan Bangunan	9
11	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9
12	Kepala UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah	9
13	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9
14	Kepala UPTD Perlengkapan, Pengelolaan Aspal	9

	dan Beton	
15	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9
VIII	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
4	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	9
5	Kepala Bidang Perumahan	11
6	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	11
7	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman	11
8	Kepala Bidang Pertanahan	11
IX	DINAS SOSIAL	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
4	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	11
5	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	11
6	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	11
7	Kepala Bidang Penanganan Bencana	11
X	DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
4	Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	11
5	Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja	11
6	Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	11

7	Kepala Bidang Transmigrasi	11
XI	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
4	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga	11
5	Kepala Bidang Bidang Data dan Informasi	11
6	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak	11
7	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak	11
8	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	9
9	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9
XII	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Sarana	9
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	9
5	Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	11
6	Kepala Bidang Keluarga Berencana	11
7	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	11
8	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	11
XIII	DINAS KETAHANAN PANGAN	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
4	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	11

5	Kepala Bidang Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan	11
6	Kepala Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman	11
7	Kepala Bidang Mutu dan Keamanan Pangan	11
XIV	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretariat	12
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
4	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	9
5	Kepala Bidang Tata Lingkungan	11
6	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	11
7	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	11
8	Kepala Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	11
9	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan	9
10	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9
11	Kepala UPTD Pengelolaan Sampah	9
12	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9
XV	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretariat	12
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
4	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	9
5	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	11
6	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	11
7	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11

8	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	11
XVI	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
4	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	11
5	Kepala Bidang Kelembagaan Sosial dan Budaya Masyarakat	11
6	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pengelolaan Keuangan Desa	11
7	Kepala Bidang Pemberdayaan Swadaya Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	11
XVII	DINAS PERHUBUNGAN	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
5	Kepala Bidang Lalu Lintas	11
6	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Lalu Lintas	9
7	Kepala Seksi Sistem Informasi Lalu Lintas dan Pembinaan	9
8	Kepala Bidang Angkutan	11
9	Kepala Seksi Angkutan Laut, Udara dan Kepelabuhanan	9
10	Kepala Seksi Program dan Pengembangan Angkutan	9
11	Kepala Bidang Teknik Sarana Prasarana dan Keselamatan	11
12	Kepala Seksi Teknik Sarana	9

13	Kepala Seksi Teknik Prasarana	9
XVIII	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
4	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	9
5	Kepala Bidang Tata Kelola SPBE	11
6	Kepala Bidang Komunikasi Publik	11
7	Kepala Bidang Informasi Publik	11
8	Kepala Bidang Persandian, Pos dan Telekomunikasi	11
9	Kepala Bidang Statistik dan Data Elektronik	11
XIX	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
4	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	11
5	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	11
6	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah	11
XX	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
XXI	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9

4	Kepala Bidang Layanan Kepemudaan	11
5	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	11
6	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga	11
7	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan	11
XXII	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
4	Kepala Bidang Pelayanan, Pembinaan Tata Kelola Perpustakaan	9
5	Kepala Bidang Pengembangan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka	11
6	Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan	11
7	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Statis	11
XXIII	DINAS PERIKANAN	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan	11
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan	11
6	Kepala Bidang Perizinan Usaha Perikanan	11
7	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	11
8	Kepala UPTD Budidaya Air Tawar/Air Payau	9
9	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9
XXIV	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
4	Kepala Bidang Destinasi dan Industri	11

	Pariwisata	
5	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	11
6	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11
7	Kepala Bidang Kebudayaan	11
XXV	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
4	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	11
5	Kepala Bidang Tanaman Pangan	11
6	Kepala Bidang Hortikultura	11
7	Kepala Bidang Perkebunan	11
8	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian	11
9	Kepala UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	9
10	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9
11	Kepala UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	9
12	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9
XXVI	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
4	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	11
5	Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi	11
6	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran	11

7	Kepala Bidang Penyuluhan	11
8	Kepala UPTD Rumah Potong Hewan	9
9	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9
10	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan	9
11	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9
12	Kepala UPTD Balai Pembibitan Ternak	9
13	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9
XXVII	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
4	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	9
5	Kepala Bidang Perdagangan	11
6	Kepala Bidang Kemetrolagian	11
7	Kepala Bidang Pasar	11
8	Kepala Bidang Perindustrian	11
9	Kepala Bidang Energi	11
10	Kepala UPTD Pelayanan Pasar	9
11	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9
12	Kepala UPTD Industri Kecil dan Menengah	9
13	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9
XXVIII	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretariat	12
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9
5	Kepala Bidang Pencegahan	11
6	Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi	9

7	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat	9
8	Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan	11
9	Kepala Seksi Pemadaman dan Investigasi	9
10	Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi	9
11	Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana	11
12	Kepala Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana	9
13	Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Pengolahan Data	9
14	Kepala UPTD Pemadam Kebakaran	9
15	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9
XXIX	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
1	Kepala Badan	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
4	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	9
5	Kepala Bidang Ekonomi	11
6	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan	11
7	Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana Wilayah	11
8	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	11
9	Kepala UPTD Data Spasial	9
10	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9
XXX	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
1	Kepala Badan	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
4	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan	11
5	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan	11
6	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi	11

XXXI	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
1	Kepala Badan	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
4	Kepala Bidang Anggaran	11
5	Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD	9
6	Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Pengendalian Anggaran	9
7	Kepala Bidang Akuntansi	11
8	Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD	9
9	Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan	9
10	Kepala Bidang Perbendaharaan	11
11	Kepala Sub Bidang Pengeluaran Kas dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran	9
12	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Gaji	9
13	Kepala Bidang Aset Daerah	11
14	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah	9
XXXII	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
1	Kepala Badan	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
4	Kepala Bidang Pengembangan Dan Penetapan	11
5	Kepala Sub Bidang Pengawasan Dan Pengendalian	9
6	Kepala Bidang PBB P2 dan BPHTP	11
7	Kepala Sub Bidang BPHTB	9
8	Kepala Bidang Penagihan	11

9	Kepala Sub Bidang Keberatan dan Banding	9
10	Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan	11
11	Kepala Sub Bidang Informasi Data dan Dokumentasi	9
12	Kepala UPTD Pelayanan Pajak	9
13	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9
XXXIII	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	
1	Kepala Badan	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
4	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	9
5	Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai	11
6	Kepala Bidang Pendidikan Latihan dan Pengembangan Pegawai	11
7	Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Pensiun Pegawai	11
8	Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian	11
XXXIV	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1	Kepala Badan	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
4	Kepala Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	11
5	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	11
6	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	11
7	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	11
XXXV	BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	Kepala Pelaksana	14

2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
4	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	11
5	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	11
6	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	11
XXXVI	RSUD DR.H.BOB BAZAR, SKM	
1	Direktur	13
2	Kepala Bagian Tata Usaha	11
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
5	Kepala Sub Bagian Keuangan	9
6	Kepala Bidang Pelayanan Medis	11
7	Kepala Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan Medis	9
8	Kepala Seksi Pengendalian Fasilitas Pelayanan Medis	9
9	Kepala Bidang Keperawatan	11
10	Kepala Seksi Etika dan Mutu Keperawatan	9
11	Kepala Seksi Logistik Keperawatan	9
12	Kepala Bidang Penunjang	11
13	Kepala Seksi Penunjang Medis	9
14	Kepala Seksi Penunjang Non Medis	9
XXXVII	KECAMATAN NATAR	
1	Camat	12
2	Sekretaris	11
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8
5	Kepala Seksi Pemerintahan	9
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9

7	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	9
8	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan Dan Infokom	9
9	Kepala Seksi Pertanahan dan Tata Ruang	9
XXXVIII	KECAMATAN TANJUNG BINTANG	
1	Camat	12
2	Sekretaris	11
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8
5	Kepala Seksi Pemerintahan	9
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9
7	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	9
8	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan Dan Infokom	9
9	Kepala Seksi Pertanahan dan Tata Ruang	9
XXXIX	KECAMATAN KALIANDA	
1	Camat	12
2	Sekretaris	11
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8
5	Kepala Seksi Pemerintahan	9
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9
7	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	9
8	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan Dan Infokom	9
9	Kepala Seksi Pertanahan dan Tata Ruang	9
XXXX	KECAMATAN SIDOMULYO	
1	Camat	12

2	Sekretaris	11
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8
5	Kepala Seksi Pemerintahan	9
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9
7	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	9
8	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan Dan Infokom	9
9	Kepala Seksi Pertanahan dan Tata Ruang	9
XXXXI	KECAMATAN KATIBUNG	
1	Camat	12
2	Sekretaris	11
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8
5	Kepala Seksi Pemerintahan	9
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9
7	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	9
8	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan Dan Infokom	9
9	Kepala Seksi Pertanahan dan Tata Ruang	9
XXXXII	KECAMATAN PENENGAHAN	
1	Camat	12
2	Sekretaris	11
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8
5	Kepala Seksi Pemerintahan	9
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	9

	Umum	
7	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	9
8	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan Dan Infokom	9
9	Kepala Seksi Pertanahan dan Tata Ruang	9
XXXXIII	KECAMATAN PALAS	
1	Camat	12
2	Sekretaris	11
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8
5	Kepala Seksi Pemerintahan	9
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9
7	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	9
8	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan Dan Infokom	9
9	Kepala Seksi Pertanahan dan Tata Ruang	9
XXXXIV	KECAMATAN JATI AGUNG	
1	Camat	12
2	Sekretaris	11
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8
5	Kepala Seksi Pemerintahan	9
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9
7	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	9
8	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan Dan Infokom	9
9	Kepala Seksi Pertanahan dan Tata Ruang	9
XXXXV	KECAMATAN KETAPANG	

1	Camat	12
2	Sekretaris	11
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8
5	Kepala Seksi Pemerintahan	9
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9
7	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	9
8	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan Dan Infokom	9
9	Kepala Seksi Pertanahan dan Tata Ruang	9
XXXXVI	KECAMATAN SRAGI	
1	Camat	12
2	Sekretaris	11
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8
5	Kepala Seksi Pemerintahan	9
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9
7	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	9
8	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan Dan Infokom	9
9	Kepala Seksi Pertanahan dan Tata Ruang	9
XXXXVII	KECAMATAN RAJABASA	
1	Camat	12
2	Sekretaris	11
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8

5	Kepala Seksi Pemerintahan	9
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9
7	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	9
8	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan Dan Infokom	9
9	Kepala Seksi Pertanahan dan Tata Ruang	9
XXXXVIII	KECAMATAN CANDIPURO	
1	Camat	12
2	Sekretaris	11
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8
5	Kepala Seksi Pemerintahan	9
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9
7	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	9
8	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan Dan Infokom	9
9	Kepala Seksi Pertanahan dan Tata Ruang	9
XXXXIX	KECAMATAN MERBAU MATARAM	
1	Camat	12
2	Sekretaris	11
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8
5	Kepala Seksi Pemerintahan	9
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9
7	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	9
8	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan Dan Infokom	9

9	Kepala Seksi Pertanahan dan Tata Ruang	9
XXXXX	KECAMATAN BAKAUHANI	
1	Camat	12
2	Sekretaris	11
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8
5	Kepala Seksi Pemerintahan	9
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9
7	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	9
8	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan Dan Infokom	9
9	Kepala Seksi Pertanahan dan Tata Ruang	9
XXXXXI	KECAMATAN TANJUNG SARI	
1	Camat	12
2	Sekretaris	11
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8
5	Kepala Seksi Pemerintahan	9
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9
7	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	9
8	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan Dan Infokom	9
9	Kepala Seksi Pertanahan dan Tata Ruang	9
XXXXXII	KECAMATAN WAY SULAN	
1	Camat	12
2	Sekretaris	11
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8

4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8
5	Kepala Seksi Pemerintahan	9
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9
7	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	9
8	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan Dan Infokom	9
9	Kepala Seksi Pertanahan dan Tata Ruang	9
XXXXXIII	KECAMATAN WAY PANJI	
1	Camat	12
2	Sekretaris	11
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8
5	Kepala Seksi Pemerintahan	9
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9
7	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	9
8	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan Dan Infokom	9
9	Kepala Seksi Pertanahan dan Tata Ruang	9
XXXXXIV	KELURAHAN BUMI AGUNG KECAMATAN KALIANDA	
1	Lurah	9
2	Sekretaris Lurah	8
3	Kepala Seksi Pemeritahan dan Kesejahteraan Masyarakat	8
4	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	8
5	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	8
XXXXXV	KELURAHAN KALIANDA KECAMATAN KALIANDA	
1	Lurah	9

2	Sekretaris Lurah	8
3	Kepala Seksi Pemeritahan dan Kesejahteraan Masyarakat	8
4	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	8
5	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	8
XXXXXVI	KELURAHAN WAY URANG KECAMATAN KALIANDA	
1	Lurah	9
2	Sekretaris Lurah	8
3	Kepala Seksi Pemeritahan dan Kesejahteraan Masyarakat	8
4	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	8
5	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	8
XXXXXVII	KELURAHAN WAI LUBUK KECAMATAN KALIANDA	
1	Lurah	9
2	Sekretaris Lurah	8
3	Kepala Seksi Pemeritahan dan Kesejahteraan Masyarakat	8
4	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	8
5	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	8

BUPATI LAMPUNG SELATAN.

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN II :  
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR 1.1 TAHUN 2026  
 TENTANG KELAS JABATAN DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

B. DAFTAR KELAS JABATAN NON MANAJERIAL

1. JABATAN FUNGSIONAL UMUM/ JABATAN PELAKSANA

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	Pengelola Umum Operasional	1
2	Pengelola Umum Operasional	3
3	Pengadministrasi Perkantoran	5
4	Penilik Jalan	5
5	Operator Layanan Kesehatan	5
6	Operator Layanan Operasional	5
7	Operator Alat Berat	5
8	Pranata Trantibum	5
9	Pengolah Data dan Informasi	6
10	Pengelola Layanan Operasional	6
11	Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	6
12	Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	6
13	Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6
14	Pengelola Layanan Kesehatan	6
15	Petugas Transportasi Darat	6
16	Operator Alat Berat	6
17	Penelaah Teknis Kebijakan	7
18	Penata Layanan Operasional	7
19	Penata Kelola Pemerintahan	7
20	Penata Keprotokolan	7
21	Teknisi Sarana dan Prasarana	7
22	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7

23	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	7
24	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
25	Penata Kelola Layanan Kesehatan	7
26	Fasilitator Perdagangan	7
27	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	7
28	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	7

## 2. JABATAN FUNGSIONAL

1	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
3	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12
4	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14
5	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6
6	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7
7	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	8
8	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
9	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
10	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
11	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama	14
12	Perencana Ahli Pertama	8
13	Perencana Ahli Muda	10
14	Perencana Ahli Madya	12
15	Perencana Ahli Utama	14
16	Pranata Komputer Pemula	5
17	Pranata Komputer Terampil	6
18	Pranata Komputer Mahir	7
19	Pranata Komputer Penyelia	8
20	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
21	Pranata Komputer Ahli Muda	9
22	Pranata Komputer Ahli Madya	11
23	Pranata Komputer Ahli Utama	13
24	Arsiparis Terampil	6

25	Arsiparis Mahir	7
26	Arsiparis Penyelia	8
27	Arsiparis Ahli Pertama	8
28	Arsiparis Ahli Muda	9
29	Arsiparis Ahli Madya	11
30	Arsiparis Ahli Utama	13
31	Penata Laksana Barang Pelaksana/ Terampil	7
32	Penata Laksana Barang Pelaksana Lanjutan/ Mahir	8
33	Penata Laksana Barang Penyelia	9
34	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	8
35	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	10
36	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	12
37	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama	14
38	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	8
39	Penyuluh Hukum Ahli Muda	9
40	Penyuluh Hukum Ahli Madya	11
41	Penyuluh Hukum Ahli Utama	13
42	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
43	Analisis Hukum Ahli Muda	9
44	Analisis Hukum Ahli Madya	11
45	Analisis Hukum Ahli Utama	13
46	Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil	6
47	Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir	7
48	Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia	9
49	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	8
50	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda	10
51	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Madya	12
52	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Utama	14
53	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8
54	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9

55	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	11
56	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Utama	13
57	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
58	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
59	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12
60	Analisis Keuangan Negara Terampil	7
61	Analisis Keuangan Negara Mahir	8
62	Analisis Keuangan Negara Penyelia	9
63	Analisis Keuangan Negara Pertama	8
64	Analisis Keuangan Negara Muda	10
65	Analisis Keuangan Negara Madya	12
66	Analisis Keuangan Negara Utama	14
67	Pengawas Keuangan Negara Terampil	7
68	Pengawas Keuangan Negara Mahir	8
69	Pengawas Keuangan Negara Penyelia	9
70	Pengawas Keuangan Negara Pertama	8
71	Pengawas Keuangan Negara Muda	10
72	Pengawas Keuangan Negara Madya	12
73	Pengawas Keuangan Negara Utama	14
74	Pranata Hubungan Masyarakat Pemula	5
75	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6
76	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7
77	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
78	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
79	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
80	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11
81	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8
82	Analisis Anggaran Ahli Muda	10
83	Analisis Anggaran Ahli Madya	12
84	Analisis Anggaran Ahli Utama	14
85	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	8
86	Perisalah Legislatif Ahli Muda	9
87	Perisalah Legislatif Ahli Madya	11

88	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	8
89	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	10
90	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	12
91	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Utama	14
92	Auditor Ahli Pertama	8
93	Auditor Ahli Muda	10
94	Auditor Ahli Madya	12
95	Auditor Ahli Utama	14
96	Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula / Pemula	5
97	Polisi Pamong Praja Pelaksana / Terampil	6
98	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan / Mahir	7
99	Polisi Pamong Praja Penyelia	8
100	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	8
101	Polisi Pamong Praja Ahli Muda	9
102	Polisi Pamong Praja Ahli Madya	11
103	Guru Ahli Pertama	8
104	Guru Ahli Muda	9
105	Guru Ahli Madya	11
106	Guru Ahli Utama	13
107	Pengawas Sekolah Ahli Muda	9
108	Pengawas Sekolah Ahli Madya	11
109	Pengawas Sekolah Ahli Utama	13
110	Penilik Ahli Pertama	8
111	Penilik Ahli Muda	9
112	Penilik Ahli Madya	11
113	Penilik Ahli Utama	13
114	Pamong Belajar Ahli Pertama	8
115	Pamong Belajar Ahli Muda	9
116	Pamong Belajar Ahli Madya	11
117	Pustakawan Ahli Pertama	8

118	Pustakawan Ahli Muda	9
119	Pustakawan Ahli Madya	11
120	Pustakawan Ahli Utama	13
121	Dokter Ahli Pertama	9
122	Dokter Ahli Muda	10
123	Dokter Ahli Madya	12
124	Dokter Ahli Utama	14
125	Dokter Ahli Muda (Spesialis)	10
126	Dokter Ahli Madya (Spesialis)	12
127	Dokter Utama (Spesialis)	14
128	Dokter Gigi Ahli Pertama	9
129	Dokter Gigi Ahli Muda	10
130	Dokter Gigi Ahli Madya	12
131	Dokter Gigi Ahli Utama	14
132	Bidan Pemula	5
133	Bidan Terampil	6
134	Bidan Mahir	7
135	Bidan Penyelia	8
136	Bidan Ahli Pertama	8
137	Bidan Ahli Muda	9
138	Bidan Ahli Madya	11
139	Perawat Pelaksana Pemula/ Pemula	5
140	Perawat Terampil	6
141	Perawat Mahir	7
142	Perawat Penyelia	8
143	Perawat Ahli Pertama	8
144	Perawat Ahli Muda	9
145	Perawat Ahli Madya	11
146	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6
147	Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7
148	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8
149	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama	8
150	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda	9

151	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya	11
152	Apoteker Ahli Pertama	8
153	Apoteker Ahli Muda	9
154	Apoteker Ahli Madya	11
155	Apoteker Ahli Utama	13
156	Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5
157	Asisten Apoteker Pelaksana / Terampil	6
158	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan / Mahir	7
159	Asisten Apoteker Penyelia	8
160	Nutrisisionis Pelaksana / Terampil	6
161	Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan / Mahir	7
162	Nutrisisionis Penyelia	8
163	Nutrisisionis Ahli Pertama	8
164	Nutrisisionis Ahli Muda	9
165	Nutrisisionis Ahli Madya	11
166	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil	6
167	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Mahir	7
168	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Penyelia	8
169	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	8
170	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda	9
171	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya	11
172	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	8
173	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	9
174	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	11
175	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5
176	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/ Terampil	6
177	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/ Mahir	7
178	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8

179	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	8
180	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	9
181	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya	11
182	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	6
183	Tenaga Sanitasi Lingkungan Mahir	7
184	Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia	8
185	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	8
186	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda	9
187	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Madya	11
188	Fisioterapis Pelaksana / Terampil	6
189	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan / Mahir	7
190	Fisioterapis Penyelia	8
191	Fisioterapis Ahli Pertama	8
192	Fisioterapis Ahli Muda	9
193	Fisioterapis Ahli Madya	11
194	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	8
195	Administrator Kesehatan Ahli Muda	9
196	Administrator Kesehatan Ahli Madya	11
197	Perekam Medis Pelaksana/ Terampil	6
198	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan/ Mahir	7
199	Perekam Medis Penyelia	8
200	Perekam Medis Ahli Pertama	8
201	Perekam Medis Ahli Muda	9
202	Perekam Medis Ahli Madya	11
203	Entomolog Kesehatan Pemula	5
204	Entomolog Kesehatan Terampil	6
205	Entomolog Kesehatan Mahir	7
206	Entomolog Kesehatan Penyelia	8
207	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	8
208	Entomolog Kesehatan Ahli Muda	9
209	Entomolog Kesehatan Ahli Madya	11
210	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	8
211	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	10

212	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	12
213	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Utama	14
214	Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	8
215	Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	10
216	Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Ahli Madya	12
217	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Utama	14
218	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama	8
219	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda	10
220	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Madya	12
221	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Utama	14
222	Penata Ruang Ahli Pertama	8
223	Penata Ruang Ahli Muda	10
224	Penata Ruang Ahli Madya	12
225	Penata Ruang Ahli Utama	14
226	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	8
227	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	10
228	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya	12
229	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama	14
230	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	8
231	Penyuluh Sosial Ahli Muda	10
232	Penyuluh Sosial Ahli Madya	12
233	Penyuluh Sosial Ahli Utama	14
234	Pekerja Sosial Pemula	5
235	Pekerja Sosial Terampil	6
236	Pekerja Sosial Mahir	7
237	Pekerja Sosial Penyelia	8
238	Pekerja Sosial Ahli Pertama	8
239	Pekerja Sosial Ahli Muda	10
240	Pekerja Sosial Ahli Madya	12
241	Pekerja Sosial Ahli Utama	14

242	Instruktur Ahli Pertama	8
243	Instruktur Ahli Muda	10
244	Instruktur Ahli Madya	12
245	Instruktur Ahli Utama	14
246	Pengantar Kerja Ahli Pertama	8
247	Pengantar Kerja Ahli Muda	10
248	Pengantar Kerja Ahli Madya	12
249	Pengantar Kerja Ahli Utama	14
250	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	8
251	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	10
252	Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya	12
253	Mediator Hubungan Industrial Ahli Utama	14
254	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8
255	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	10
256	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	12
257	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama	14
258	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama	8
259	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	9
260	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya	11
261	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Utama	13
262	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	8
263	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	10
264	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya	12
265	Analisis Pasar Hasil Pertanian Terampil	6
266	Analisis Pasar Hasil Pertanian Mahir	7
267	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama	8
268	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	10
269	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya	12
270	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pemula	5
271	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Terampil	6

272	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Mahir	7
273	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia	8
274	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	8
275	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	9
276	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya	11
277	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	8
278	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	10
279	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	12
280	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama	14
281	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	8
282	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	10
283	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya	12
284	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Utama	14
285	Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama	8
286	Administrator Database Kependudukan Ahli Muda	9
287	Administrator Database Kependudukan Ahli Madya	11
288	Sandiman Pelaksana/ Terampil	7
289	Sandiman Pelaksana Lanjutan/ Mahir	8
290	Sandiman Penyelia	9
291	Sandiman Ahli Pertama	8
292	Sandiman Ahli Muda	10
293	Sandiman Ahli Madya	12
294	Sandiman Ahli Utama	14
295	Statistisi Ahli Pertama	8
296	Statistisi Ahli Muda	9
297	Statistisi Ahli Madya	11
298	Pengawas Koperasi Ahli Pertama	8
299	Pengawas Koperasi Ahli Muda	10
300	Pengawas Koperasi Ahli Madya	12
301	Pengawas Koperasi Ahli Utama	14
302	Penata Perizinan Ahli Pertama	8
303	Penata Perizinan Ahli Muda	10

304	Penata Perizinan Ahli Madya	12
305	Penata Perizinan Ahli Utama	14
306	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama	8
307	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	10
308	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Madya	12
309	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Utama	14
310	Penyuluh Perikanan Ahli Pertama	8
311	Penyuluh Perikanan Ahli Muda	10
312	Penyuluh Perikanan Ahli Madya	12
313	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	8
314	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda	10
315	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Madya	12
316	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Utama	14
317	Pamong Budaya Ahli Pertama	8
318	Pamong Budaya Ahli Muda	9
319	Pamong Budaya Ahli Madya	11
320	Pamong Budaya Ahli Utama	13
321	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama	8
322	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda	10
323	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya	12
324	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	8
325	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	9
326	Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya	11
327	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pemula	6
328	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil	7
329	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Mahir	8
330	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia	9
331	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama	8

332	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda	10
333	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya	12
334	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	8
335	Pengawas Mutu Pakan Pemula	5
336	Pengawas Mutu Pakan Terampil	6
337	Pengawas Mutu Pakan Mahir	7
338	Pengawas Mutu Pakan Penyelia	8
339	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	8
340	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda	9
341	Pengawas Bibit Ternak Terampil	6
342	Pengawas Bibit Ternak Mahir	7
343	Pengawas Bibit Ternak Penyelia	8
344	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	8
345	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	9
346	Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya	11
347	Paramedik Veteriner Pemula	5
348	Paramedik Veteriner Terampil	6
349	Paramedik Veteriner Mahir	7
350	Paramedik Veteriner Penyelia	8
351	Medik Veteriner Ahli Pertama	8
352	Medik Veteriner Ahli Muda	9
353	Medik Veteriner Ahli Madya	11
354	Medik Veteriner Ahli Utama	13
355	Analisis Perdagangan Ahli Pertama	8
356	Analisis Perdagangan Ahli Muda	10
357	Analisis Perdagangan Ahli Madya	12
358	Analisis Perdagangan Ahli Utama	14
359	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana/ Terampil	6
360	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana Lanjutan/ Mahir	7
361	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Penyelia	8

362	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama	8
363	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	9
364	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya	11
365	Penera Terampil	7
366	Penera Mahir	8
367	Penera Penyelia	9
368	Penera Ahli Pertama	8
369	Penera Ahli Muda	10
370	Penera Ahli Madya	12
371	Penera Ahli Utama	14
372	Pengamat Tera Pemula	5
373	Pengamat Tera Terampil	6
374	Pengamat Tera Mahir	7
375	Pengamat Tera Penyelia	8
376	Pemadam Kebakaran Pemula	5
377	Pemadam Kebakaran Terampil	6
378	Pemadam Kebakaran Mahir	7
379	Pemadam Kebakaran Penyelia	8
380	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	8
380	Analisis Kebakaran Ahli Muda	9
380	Analisis Kebakaran Ahli Madya	11
378	Analisis Data Ilmiah Ahli Pertama	8
379	Analisis Data Ilmiah Ahli Muda	9
380	Analisis Data Ilmiah Ahli Madya	11
381	Analisis Data Ilmiah Ahli Utama	13
382	Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Pertama	8
383	Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Muda	9
384	Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Madya	11

385	Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Utama	13
386	Peneliti Ahli Pertama	8
387	Peneliti Ahli Muda	9
388	Peneliti Ahli Madya	12
389	Peneliti Ahli Utama	14
390	Widyaiswara Ahli Pertama	8
391	Widyaiswara Ahli Muda	10
392	Widyaiswara Ahli Madya	12
393	Widyaiswara Ahli Utama	14
394	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	8
395	Analisis Kebencanaan Ahli Muda	9
396	Analisis Kebencanaan Ahli Madya	12
393	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	8
394	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	9
395	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya	12
396	Penata Anestesi Ahli Pertama	8
397	Penata Anestesi Ahli Muda	9
398	Penata Anestesi Ahli Madya	11
399	Refraksionis Optisien Pelaksana/ Terampil	6
400	Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan/ Mahir	7
398	Refraksionis Optisien Penyelia	8
399	Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula	5
400	Teknisi Transfusi Darah Pelaksana/ Terampil	6
401	Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Lanjutan/ Mahir	7
402	Teknisi Transfusi Darah Penyelia	8
403	Radiografer Pelaksana/ Terampil	6
404	Radiografer Pelaksana Lanjutan/ Mahir	7
405	Radiografer Penyelia	8
406	Radiografer Ahli Pertama	8
407	Radiografer Ahli Muda	9
408	Radiografer Ahli Madya	11

409	Fisikawan Medis Ahli Pertama	8
410	Fisikawan Medis Ahli Muda	9
411	Fisikawan Medis Ahli Madya	11
412	Teknisi Elektromedis Terampil	6
413	Teknisi Elektromedis Mahir	7
414	Teknisi Elektromedis Penyelia	8

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RADITYO EGI PRATAMA